PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Telepon (0532) 21126 Pangkalan Bun
KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 15 Juni 2022

Nomor : 027/165/PBJ/VI/2022.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Klarifikasi RUP dan Pagu Belanja Pengadaan

Kepada
Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat
Di
PANGKALAN BUN

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 13376/D.2/06/2022, tanggal 13 Juni 2022, hal sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mengumumkan RUP lebih besar dari pagu belanja pengadaan.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon bantuan Saudara untuk melakukan klarifikasi dan pembetulan RUP terhadap nilai pagu belanja pengadaan (**Belanja Operasi** akun 5.1.02 Belanja Barang Jasa dan **Belanja Modal**) yang sudah ditaetapkan. Mohon klarifikasi dapat disampaikan sebelum tanggal 25 Juni 2022.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH :

SUYANTO, SH.,MH
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :
1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun.
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun
3. Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
4. Arsip.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti huku sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektrionik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikat Elektronik)

Balai Sertifikasi Elektronik

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 13376/D.2/06/2022 13 Juni 2022
Hal : Permohonan Klarifikasi RUP dan Pagu Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

Yth. **Yth. Sekretaris Daerah**
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 berupaya menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk merencanakan dan mengalokasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN). Kepala Daerah juga diinstruksikan untuk merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dari hasil produksi dalam negeri. Di dalam instruksi tersebut, Presiden juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasanya pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.

Dalam Inpres tersebut, LKPP diamanatkan salah satunya untuk memberikan akses data dan informasi terkait SiRUP sebagai mekanisme *early warning system*/pemantauan. Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagai salah satu unsur pelaksana tugas LKPP, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Kepala Daerah dapat melakukan monitoring data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SiRUP secara mingguan melalui menu dashboard pada tautan: sirup.lkpp.go.id. Pada dashboard tersebut terinformasikan persentase RUP Pemda, nilai pagu dan jumlah paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudah diumumkan pada SiRUP termasuk perencanaan paket yang dicadangkan untuk PDN dan UMKK.
2. Nilai Belanja Pengadaan pada dashboard SiRUP digunakan sebagai dasar perhitungan persentase nilai pagu RUP yang diumumkan. Nilai Belanja Pengadaan Pemda adalah total nilai pagu akun belanja barang/jasa (5.01.02) dan akun belanja modal (5.02) berdasarkan Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan per 13 April 2022 yang dimuat pada tautan: https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412.
3. Mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP, akun belanja yang diasosiasikan dengan belanja pengadaan barang/jasa Pemda terdapat pada akun belanja operasional yaitu akun belanja barang/jasa (5.01.02) dan akun belanja modal (5.02). Namun tidak tertutup kemungkinan belanja pengadaan Pemda terdapat pula pada akun belanja hibah (5.01.05), belanja bantuan sosial (5.01.06), dan belanja tidak terduga (5.03). Sebaliknya tidak seluruh paket kegiatan pada akun belanja barang/jasa (5.01.02) bisa dikategorikan sebagai belanja pengadaan.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengumuman RUP Pemda sebagaimana informasi yang tayang pada dashboard SiRUP untuk data per 30 Mei 2022, didapatkan:
   a. Tiga (3) Kabupaten yang belum mengumumkan RUP pada SiRUP sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : n9yUPd
Nomor Tiket : SK202206130034

b. Sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengumumkan RUP melebihi nilai belanja pengadaannya (lebih dari 100%) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;

c. Persentase pengumuman RUP hingga 70% untuk 81 (delapan puluh satu) Pemda sebagaimana tercantum dalam lampiran 4;

d. Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang sudah mengumumkan RUP lebih dari 70% s.d. 100% mencapai 102 (serratus dua) Pemda sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.

5. Memperhatikan poin di atas, kami mengharapkan agar:
   a. Pemerintah Daerah terus mendorong seluruh satuan kerjanya untuk mengumumkan rencana belanja pengadaan barang/jasanya melalui SiRUP;
   b. Pemerintah Daerah juga perlu mendorong satuan kerja melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan baik dan tepat, khususnya dalam memetakan dan mengidentifikasi belanja kegiatan yang bisa dikategorikan ke dalam pengadaan barang/jasa untuk diumumkan RUP-nya melalui SiRUP. Hal ini untuk mencegah persentase pengumuman RUP yang melebihi 100% atau di atas nilai belanja pengadaannya;
   c. Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi dan validasi data nilai belanja pengadaannya. Klarifikasi tersebut akan kami gunakan untuk memperbaiki nilai belanja pengadaan yang saat ini digunakan sebagai acuan sebagaimana poin 2 dan sekaligus untuk meningkatkan akurasi sebagaimana poin 3. Klarifikasi juga menjadi penting agar perhitungan persentase pengumuman RUP tidak melebihi 100%;
   d. Untuk itu kami mohon bantuan unit organisasi yang terkait di lingkup Pemerintah Daerah Saudara/i, agar melakukan klarifikasi terhadap nilai belanja pengadaan barang/jasa sebagaimana terlampir. Mohon klarifikasi dapat disampaikan sebelum 30 Juni 2022. Kami akan menggunakan data belanja PBJ sebagaimana terlampir sebagai acuan, apabila tidak ada klarifikasi sampai dengan tanggal tersebut.

Jika diperlukan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Rosa (HP. 0852-1320-0876) dan Putri (HP. 0897-1368-558).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi,
dan Pengembangan Sistem
Informasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Gatot Pambudhi Poetranto

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : n9yUPd
Nomor Tiket : SK202206130034

Daftar Pemerintah Daerah yang memiliki Persentase **RUP > 100%**

(cut off SIRUP per 30 Mei 2022)

No	Nama Pemda	Jenis Instansi	Belanja Pengadaan (Rp)	Nilai RUP (Rp)	% SIRUP
207	Kabupaten Blora	Kabupaten	907,996,325,822	1,527,542,650,519	168%
208	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	512,913,706,031	860,172,560,500	168%
209	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	582,065,344,669	976,131,787,575	168%
210	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten	253,518,112,429	420,691,991,796	166%
211	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten	330,910,746,597	546,481,381,802	165%
212	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	695,380,262,733	1,143,225,555,772	164%
213	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten	497,791,434,899	814,778,369,489	164%
214	Kabupaten Samosir	Kabupaten	372,621,570,182	604,994,571,547	162%
215	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	416,317,221,799	668,696,721,096	161%
216	Kabupaten Batubara	Kabupaten	596,598,980,812	955,331,644,549	160%
217	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	504,290,849,118	804,114,173,228	159%
218	Kabupaten Lingga	Kabupaten	401,985,036,586	639,306,966,570	159%
219	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	1,059,832,031,038	1,685,477,328,937	159%
220	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	455,735,518,445	724,231,895,925	159%
221	Kabupaten Mamuju	Kabupaten	485,561,675,520	768,771,379,286	158%
222	Kabupaten Kediri	Kabupaten	1,230,118,031,508	1,937,487,874,395	158%
223	Kabupaten Wajo	Kabupaten	541,871,696,320	833,195,639,231	154%
224	Kabupaten Sragen	Kabupaten	820,748,832,790	1,254,076,130,807	153%
225	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten	619,272,529,725	928,698,467,734	150%
226	Kabupaten Batanghari	Kabupaten	898,146,154,727	1,344,267,839,412	150%
227	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten	395,358,964,872	589,457,942,824	149%
228	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten	593,728,664,984	881,432,615,803	148%
229	Kabupaten Asahan	Kabupaten	653,358,152,360	969,660,371,229	148%
230	Kabupaten Manokwari	Kabupaten	505,330,167,129	746,604,648,390	148%
231	Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten	645,244,365,615	943,819,665,686	146%
232	Kabupaten Bungo	Kabupaten	344,089,999,372	500,877,730,060	146%